

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasar tradisional sudah memegang peranan penting sejak lama dalam menggerakkan ekonomi rakyat. Pasar dianggap sebagai tempat untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam bertahan hidup sehari-hari dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan tambahan lainnya. WJ Stanton berpendapat bahwa pasar adalah tempat orang-orang yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk berbelanja serta kemauan untuk membelanjakannya. Tempat dimana calon pembeli dan penjual melakukan transaksi untuk memperoleh suatu barang dan jasa dengan sejumlah pengorbanan (Adiyadnya, 2015 : 2).

Pasar tradisional yang menjadi tumpuan masyarakat saat ini kurang memiliki daya tarik jika dibandingkan dengan pasar modern yang semakin menjamur. Konsep pasar tradisional yang identik dengan kotor, kumuh, bau, dan semrawut menyebabkan masyarakat tidak nyaman untuk berbelanja. Inilah yang menjadi kelemahan dari pasar tradisional jika dibandingkan dengan pasar modern, selain lebih nyaman juga dengan pelayanan yang lebih maksimal (Malano, 2011 : 2). Pasar modern yang teratur dan bersih menyebabkan masyarakat saat ini lebih memilih beralih dari pasar tradisional, walaupun harga di pasar modern jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga barang di pasar

tradisional. Pemerintah mulai memunculkan konsep revitalisasi untuk meminimalisir kesenjangan antara pasar tradisional dan pasar modern.

Revitalisasi merupakan proses memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian yang dulunya pernah vital atau hidup, akan tetapi kemudian mengalami degradasi. Proses revitalisasi dan pembangunan dalam sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial (Sukriswanto, 2012 : 14). Revitalisasi pasar yaitu membangun kembali pasar tradisional yang semakin menurun daya tariknya bagi masyarakat kemudian menjadikannya pasar modern atau semi modern untuk kembali menarik minat masyarakat terhadap pasar tersebut. Konsep revitalisasi pasar inilah yang kemudian menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kembali daya tarik pasar tradisional.

Namun, tidak seluruh revitalisasi pasar dapat berjalan dengan baik. Banyak contoh kasus yang terjadi di Indonesia revitalisasi pasar hanya merugikan pedagang dan menguntungkan pemerintah sebagai pemegang kendali pengelolaan pasar. Pemerintah mendominasi pengelolaan pasar dengan kekuatan intelektual yang dimiliki atau disebut Hegemoni. Hegemoni merupakan istilah yang digunakan oleh Antonio Gramsci untuk menggambarkan suatu dominasi antar golongan satu atas golongan lainnya (Nurrochman, 2008 : 2). Hegemoni berhubungan dengan penyusunan kekuatan pemerintah sebagai klas diktator. Hegemoni sebagai superstruktur mempunyai pengaruh dalam masyarakat untuk melakukan perubahan sosial. Menurut Hegel, masyarakat diatur dan dikuasai oleh kapasitas intelektual super dari pemerintah yang merupakan tatanan tertinggi dari etika dan moral (Patria, 2015 : 35)

Pada penelitian ini peneliti melihat dalam proses revitalisasi pasar terindikasi adanya Hegemoni yang terjadi. Hegemoni tersebut yaitu antara pemerintah dan para pedagang Pasar *Kite* Sungailiat. Pedagang sebagai golongan yang didominasi secara sadar mengikuti setiap Hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah membuat kesepakatan bersama dengan pedagang yang seharusnya dijalankan dengan baik. Realitasnya banyak pedagang yang merasa tidak puas dengan hasil dari revitalisasi Pasar *Kite* dan pengelolaan pasar yang dipegang pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, revitalisasi pasar juga dilakukan di Pasar Bawah Sungailiat. Pembangunan pasar yang kemudian diberi nama Pasar *Kite* ini tidak secara langsung diterima oleh para pedagang. Banyak hal yang menjadi pertentangan hingga akhirnya pemerintah dan pedagang mendapatkan titik temu dari perdebatan dan konflik yang sempat terjadi. Perundingan terkait masalah pembangunan Pasar *Kite* dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Pasar (UPT Pasar) Kecamatan Sungailiat, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop UMKM), Badan Lingkungan Hidup, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan pedagang. Perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang membuat pedagang yang sebelumnya menolak pembangunan kemudian memberikan izin revitalisasi pasar dan bersedia dirolaksi untuk sementara waktu. Kesepakatan yang dilakukan tersebut berhubungan dengan pengalokasian lapak, pembagian lapak secara merata dan ukuran lapak. Hal ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam negeri tahun 2012 pasal 22 huruf a :

memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam dilakukan renovasi dan/atau relokasi pasar tradisional.

Pada kenyataannya, Pasar *Kite* pasca revitalisasi memang tidak mengalami perkembangan yang cukup baik seperti yang diharapkan. Bangunan pasar yang terkesan tertutup membuat pasar terlihat sumpek, dengan lantai yang licin dan kondisi saluran air yang tidak baik menimbulkan bau yang tidak sedap. Kondisi ini tentunya tidak sesuai dengan dana yang telah dikeluarkan untuk pembangunan pasar. Proses revitalisasi pasar dirasakan tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada di pasar tradisional bahkan menimbulkan masalah-masalah baru yang mulai bermunculan. Masalah yang dimaksud mulai dari kondisi bangunan yang tidak sesuai, meningkatnya jumlah kios baru, retribusi dan uang kebersihan, manajemen pengelolaan pasar, hingga pembagian lapak pasar yang tidak sesuai kesepakatan.

Pemerintah sebagai golongan yang mendominasi pedagang berupaya untuk mengambil keuntungan dari dominasi yang dilakukan. Pemerintah melakukan revitalisasi pasar untuk mengubah konsep pasar tradisional menjadi pasar semi modern. Upaya revitalisasi pasar yang dilakukan pemerintah menuai banyak protes dari berbagai pihak baik pedagang ataupun masyarakat luas. Melihat tidak adanya organisasi pedagang yang terbentuk, maka pedagang kesulitan untuk menyampaikan aspirasi mereka terhadap pemerintah. Para pedagang ini tidak memiliki posisi tawar yang kuat dimata pemerintah daerah. Kesepakatan yang dilakukan pada awal proses revitalisasi pasar tidak dijalankan sesuai dengan hasil dari kesepakatan tersebut.

Berdasarkan keadaan tersebut maka penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk hegemoni yang dilakukan pemerintah terkait dengan pengelolaan pasar pasca revitalisasi. Pasar *Kite* Sungailiat dipilih karena pasar ini merupakan pasar pemerintah dan pengelolaannya ditangani langsung oleh pemerintah. Secara sadar pedagang mengikuti aturan pemerintah yang mengikat, lebih dari itu pedagang harus memberikan persetujuannya terhadap peraturan dan kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah. Namun disisi lain pedagang memiliki kesadaran untuk terlepas dari dominasi pemerintah yang memaksa yang tidak dapat dilaksanakan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dan melihat adanya hegemoni yang dibentuk oleh pemerintah terhadap pedagang pasar pasca revitalisasi yang dilakukan, sehingga dapat dirumuskan masalah : *Bagaimanakah bentuk-bentuk hegemoni yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang Pasar Kite Sungailiat pasca revitalisasi ?*

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini, adalah :

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk hegemoni pemerintah daerah terhadap pedagang pasar pasca revitalisasi pasar tradisional menjadi pasar semi modern.
2. Mendeskripsikan realitas yang terjadi di lapangan terkait dengan hegemoni pemerintah yang dirasakan oleh pedagang di Pasar *Kite* Sungailiat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat secara teoretis**

Menambah wacana studi yang berkaitan dengan perspektif hegemoni sosial khususnya dalam bidang sosiologi politik.

##### **2. Manfaat secara praktis**

- a. Memberikan pengetahuan kepada pedagang dan masyarakat terkait dengan pembuatan keputusan yang didominasi pemerintah agar tidak merugikan masyarakat
- b. Memberikan masukan bagi pemerintah dalam menjalankan realitas yang ada dimasyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa bersifat memaksa atau mengekang kepentingan pedagang kecil.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Bagian ini merangkum beberapa penelitian terdahulu atau yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain untuk mendukung keabsahan penelitian yang akan dilakukan sekarang. Dengan adanya perbandingan penelitian terdahulu, mampu melihat perkembangan baru suatu penelitian yang memiliki sifat eksploratif dan teruji kebenarannya. Adapun rujukan penelitian-penelitian terdahulu :

Penelitian yang pertama berjudul “Performa Kekuasaan dalam Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Deskriptif di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto)”, pada tahun 2009 yang diteliti oleh Muhammad Budi Santosa. Jurnal ini menjelaskan kebijakan dalam revitalisasi pasar serta performa kekuasaan yang terjadi dalam revitalisasi pasar. Penelitian dilakukan di Pasar tradisional Tanjung Anyar Kota Mojokerto karena beberapa potensi yang dimiliki oleh pasar ini

setelah adanya revitalisasi pasar. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung, wawancara dengan pemerintah dan pedagang setempat, serta studi dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang perumusan kebijakan revitalisasi pasar di Kota Mojokerto serta performa kekuasaan yang terjadi dalam proses revitalisasi. Penelitian juga digunakan untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan revitalisasi pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana interaksi aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan, bagaimana keterlibatan pedagang pasar dalam kebijakan yang disoroti dalam penelitian ini. Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori milik William N. Dunn terkait dengan Kebijakan Publik. Kebijakan publik merupakan proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berdampak kepada masyarakat luar. Proses kebijakan baru dimulai ketika para pelaku kebijakan mulai sadar bahwa adanya situasi permasalahan yaitu situasi yang dirasakan adanya kesulitan atau kekecewaan dalam perumusan kebutuhan, nilai dan kesempatan. Kebijakan publik adalah suatu proses ketata pemerintahan dan administrasi pemerintah yang menghasilkan keputusan pemerintah, dimana instansi yang terkait mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam mengarahkan masyarakat dan tanggung jawab melayani kepentingan umum.

Pihak yang terkait dengan formulasi kebijakan revitalisasi pasar yaitu DPRD Kota Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto dan Koperasi Perindustrian

Perdagangan. Pihak-pihak ini mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Dalam pembuatan kebijakan dilakukan dengan kerjasama yang baik dengan berbagai bagian termasuk dengan meminta masukan dari pedagang pasar dan masyarakat sekitar pasar. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai pihak yang terlibat langsung turun ke lapangan untuk medata jumlah pedagang dan melakukan sosialisasi terhadap pedagang pasar.

Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan revitalisasi pasar Ranjung Anyar Kota Mojokerto berbentuk asosiatif, maksudnya proses interaksi yang terjadi diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan pedagang bersama dengan DPRD Kota Mojokerto. Pemerintah dan masyarakat setempat memiliki keinginan yang sama yaitu memiliki pasar tradisional yang representative, nyaman dan bersih tanpa meninggalkan unsur tradisional. Proses perumusan kebijakan dilakukan dengan mengikutsertakan pedagang agar mampu menyaring keinginan dan aspirasi dari pedagang pasar.

Penyaringan aspirasi dari masyarakat juga diperlukan untuk pengembangan pasar Kota Mojokerto. Pendekatan pemerintah dengan proses sosialisasi yang baik membuat pedagang dan masyarakat cepat memahami pembuatan kebijakan yang tidak merugikan berbagai pihak. Pelaksanaan revitalisasi pasar menghasilkan dampak positif bagi pasar Mojokerto, karena selain adanya peningkatan jumlah pedagang tetap, pasar juga mengalami peningkatan pembelian.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang berjudul “Perlawanan Pedagang Pasar Dinoyo terhadap Pemerintah Kota Malang atas Perubahan Kebijakan Pasar Tradisional Dinoyo menjadi Pasar Modern”, pada tahun 2010 yang ditulis oleh Juinuri dan Salahudin. Jurnal ini menjelaskan terkait dengan

upaya perlawanan pedagang Pasar Dinoyo terhadap pemerintah daerah terhadap kebijakan revitalisasi pasar. Kebijakan awal yang dibentuk oleh pemerintah yaitu merenovasi pasar yang menampung lebih dari 1500 pedagang. Namun seiring berjalannya kebijakan tersebut bergeser menjadi perubahan konsep pasar tradisional menjadi pasar modern. Hal ini yang memicu pedagang Pasar Dinoyo melakukan berbagai upaya perlawanan untuk mempertahankan pasar tradisional sebagai sumber matapencaharian mereka.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Hegemoni milik Antonio Gramsci. Dalam kasus ini, terdapat Hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan dan pihak kapitalis yang member investasi bagi pengembangan pasar modern. Pemerintah dianggap memiliki daya paksa terhadap pedagang untuk melaksanakan kebijakan yang mereka buat tanpa mengikut sertakan pedagang dalam pembuatan kebijakan tersebut. Adanya kesadaran ganda yang dimiliki oleh pedagang karena merasa dirugikan, hal ini terlihat dari perlawanan yang coba dilakukan oleh pedagang ditengah paksaan mengikuti kebijakan yang dibuat oleh Walikota Malang.

Awal pembuatan kebijakan oleh Walikota Malang yaitu untuk merevitalisasi Pasar Tradisional Dinoyo karena melihat pasar yang menampung 1500 pedagang kecil ini terlihat kumuh, kotor dan semrawut. Namun, pemerintah kota Malang kemudian melakukan lompatan dengan merubah kebijakan yang sudah dibuat. Walikota Malang merubah konsep pasar tradisional menjadi pasar modern yang lebih bersih dan tertib seperti mall, hypermarket dan lainnya.

Pasar modern ditawarkan kepada mereka yang memiliki modal yang cukup besar. Konsekuensi dari pembangunan pasar modern tentunya pedagang kecil akan tersingkirkan. Pasar modern akan mengundang banyak investor baru yang memiliki banyak modal, dan menggusur pedagang kecil yang pemilik sah dari Pasar Dinoyo. Kebijakan yang dibuat oleh Walikota Malang sangat merugikan pedagang kecil dan memarginalkan para pedagang.

Para pedagang Pasar Dinoyo berusaha melepaskan diri dari tekanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Upaya perlawanan yang dilakukan pedagang antara lain melakukan demonstrasi, dialog dengan pihak pemerintah dan pengembang pasar, meminta dukungan baik formal maupun informal, meminta advokasi, melaporkan kepada ombudsman dan gubernur, melakukan mediasi dengan komnas HAM hingga melakukan doa zikir bersama. Perlawanan pedagang merupakan bentuk kesadaran dari ketertindasan pedagang atas dominasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya walikota Malang.

Hasil dari upaya perlawanan pedagang dan untuk menghindari tindakan kekerasan dalam konflik Pasar Dinoyo dilakukanlah konsensus antara pedagang dan pemerintah. Isi dari konsensus tersebut adalah dengan mengubah *site plan* pasar. Pemerintah akan memberikan ruang khusus dilantai dasar bagi pedagang pasar tradisional yang sudah memiliki kontrak atau pedagang resmi. Namun perubahan *site plan* ini masih bertentangan dengan kepentingan kedua belah pihak. Pedagang merasa akan tetap dirugikan dengan lokasi pasar yang tidak strategis dan juga uang sewa yang tentunya akan meningkat. Sedangkan pemerintah daerah tidak ingin merubah *site plan* karena dirasa akan menguntungkan bagi Pendapatan Anggaran Daerah.

Penelitian ketiga yaitu berjudul “Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional : Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul” yang ditulis oleh Eis Al Masitoh tahun 2013. Penelitian ini melihat pada dominasi pemerintah dalam pembuatan kebijakan revitalisasi Pasar Piyungan Bantul. Keberhasilan pemerintah dalam proses revitalisasi pasar khususnya dalam bentuk fisik bangunan pasar. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan wawancara dan observasi langsung.

Pasar Piyungan Bantul merupakan salah satu pasar yang menjadi korban gempa bumi tahun 2006 di Yogyakarta. Revitalisasi pasar memang sudah seharusnya dilakukan melihat kondisi bangunan yang memang sudah tua ditambah dengan kerusakan akibat gempa. Setelah dilakukannya revitalisasi, Pasar Piyungan Bantul menjadi lebih teratur, bersih dan terawat. Ditambah dengan berbagai fasilitas pelengkap mulai dari WC umum, Musollah dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pembangunan pasar dilakukan dengan konsep yang lebih modern, namun dari segi pengelolaannya masih bersifat tradisional. Hal ini dilakukan agar masyarakat kecil tidak kehilangan pasar tradisional yang jumlahnya semakin menurun tergerus dengan keberadaan pasar modern di seputaran Bantul. Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul dinilai cukup berhasil dengan peningkatan fasilitas dan perbaikan infrastruktur yang ada. Namun, dari segi pengelolaannya terdapat sedikit masalah.

Pemerintah daerah Bantul terlihat kurang memperhatikan aspirasi para pedagang terkait dengan lokasi penempatan pedagang. Banyak pedagang yang merasa merugi karena sepi pembeli dan kehilangan pelanggan. Retribusi yang bertambah juga menjadi keluhan bagi pedagang. Tingginya retribusi yang ditarik

pemerintah sudah hampir mencapai setengah dari keuntungan pedagang. Sejauh ini belum ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan pasar agar pedagang tidak terus dirugikan setelah revitalisasi dilakukan.

Dari tiga penelitian terdahulu, dapat dilihat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas berkaitan dengan proses revitalisasi pasar. Ketiga penelitian ini juga membahas dominasi pemerintah dalam pengelolaan pasar dan pembuatan kebijakan. Pada salah satu penelitian sebelumnya juga digunakan Teori Hegemoni milik Antonio Gramsci untuk mempertajam analisis dari hasil penelitian. Ketiga penelitian juga menjelaskan harus adanya kerjasama antara pemerintah dan pedagang dalam pembuatan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan pasar, agar pedagang tidak dirugikan dengan adanya proses revitalisasi pasar.

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan ketiga penelitian sebelumnya yaitu, penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan kepada bentuk-bentuk Hegemoni pemerintah terhadap pedagang. Penelitian sebelumnya lebih fokus kepada pembuatan kebijakan dan penetapan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah setempat. Penelitian sebelumnya juga membahas secara tuntas perlawanan yang dilakukan oleh pedagang dalam proses revitalisasi pasar tradisional.

## **F. Kerangka Teoretis**

Penelitian ini menggunakan Teori Hegemoni milik Antonio Gramsci. Istilah Hegemoni digunakan oleh Gramsci untuk menggambarkan bahwa dominasi satu kelas atas kelas yang lain disebabkan secara ideologis dan politis. Meskipun paksaan politik (*coercion*) selalu berperan, ideologi mungkin lebih

signifikan dalam mendapatkan persetujuan secara sadar (*consent*) dari kelas yang didominasi. Keseimbangan antara paksaan dan paksaan sadar itu bervariasi dari masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Persetujuan sadar itu lebih penting dalam masyarakat kapitalis. (Abercrombie, 2010 : 253)

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap kelas sosial lain. Ada berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak struktur kognitif dari masyarakat. Pada hakikatnya Hegemoni merupakan upaya untuk menggiring orang-orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang telah ditentukan tanpa adanya paksaan secara kekerasan (Patria, 2015 : 120-121)

Konsep hegemoni mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana masyarakat kapitalis modern diorganisasikan. Menurut Gramsci, Hegemoni merupakan suatu kesatuan kompleks dari kegiatan teori dan praktek, yang dengannya kelas yang berkuasa tak cuma membenarkan dan memelihara dominasinya tetapi mengatur untuk memenangkan konsensus aktif dari yang diatur. Dengan demikian, jalan pembebasan kondisi ini adalah massa harus dibebaskan dari keterpesonaan pada hegemoni budaya kelas kapitalis sebelum perlawanan yang berhasil terhadap pemerintah yang menindas itu bisa terjadi (Bocock, 2007 : 25)

Menurut Gramsci, negara adalah instrument utama kekuatan koersif. Dominasi ideologi memperoleh persetujuan sadar melalui lembaga-lembaga masyarakat sipil (*civil society*), keluarga, gereja, dan serikat buruh. Oleh karena itu, semakin menonjol suatu masyarakat sipil, semakin kuat kemungkinan

Hegemoni melalui sarana ideologi. Hegemoni tidak akan pernah selesai. Dalam masyarakat kapitalis kontemporer, misalnya kelas pekerja memiliki kesadaran ganda (*dual consciousness*) kesadaran yang satu ditentukan oleh ideologi kelas kapitalis, kesadaran yang satu lagi revolusioner dan ditentukan oleh pengalaman mereka dalam masyarakat kapitalis. Dalam pandangan Gramsci, agar masyarakat kapitalis dapat digulingkan, kaum buruh harus terlebih dahulu menetapkan supremasi ideologi mereka sendiri yang diturunkan dari kesadaran revolusioner. Kesadaran ganda yang dimiliki oleh kelas yang didominasi menurut Lenin hanya merupakan perlawanan yang spontan dan masih bersifat palsu (Abercrombie, 2010 : 253).

Titik tolak dari konsep Hegemoni adalah konsensus. Konsensus menurut Gramsci lebih mewujudkan suatu hipotesis bahwa terciptanya karena ada dasar persetujuan. Konsensus yang diterima oleh kelas pekerja bagi Gramsci pada dasarnya bersifat pasif. Kemunculan konsensus bukan karena kelas yang terdominasi menganggap struktur sosial yang ada sebagai keinginan mereka. Justru hal ini terjadi karena mereka kekurangan basis konseptual yang membentuk kesadaran yang memungkinkan memahami realitas sosial secara efektif (Patria, 2015 : 126).

Teori Hegemoni ini digunakan untuk menganalisis bagaimana bentuk-bentuk Hegemoni yang terjadi di Pasar *Kite* Sungailiat. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pihak yang mendominasi dan pedagang sebagai pihak yang didominasi. Ada kesadaran ganda di dalam pengolahan pasar yakni hegemoni pemerintah dan juga kesadaran pedagang dalam menerima dominasi dari pemerintah.